

# Harapan dan Prospek Pembangunan Bidang Sosial Budaya dalam Pelita IV

A. Sudiharto DJIWANDONO

## TUJUAN SOSIO-KULTURAL

Pembangunan nasional yang dimulai pada tahun 1969 dan yang pada tanggal 1 April 1984 mulai memasuki tahapan Repelita IV bukanlah semata-mata pembangunan ekonomi, meskipun selama ini pembangunan bidang ekonomi mendapatkan prioritas tinggi. Pembangunan yang semata-mata berpusat pada pembangunan ekonomi ("economocentrism") sudah ditinggalkan karena makin berkembangnya kesadaran tentang makna dan tujuan yang pokok atau yang esensial dari suatu usaha pembangunan, yang tidak lain adalah manusia itu sendiri. Apa yang disebut tujuan ekonomis dalam pembangunan, pada tingkat analisa yang lain, tidak seluruhnya bersifat ekonomis. Tujuan ekonomis untuk meningkatkan pendapatan dan produktivitas misalnya, juga mempunyai arti pada tujuan yang lebih lanjut, ialah peningkatan taraf hidup, yang pada gilirannya merupakan sarana bagi pencapaian tujuan berupa kemungkinan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan lebih lengkap dari warga masyarakat. Dengan perkataan lain setiap tujuan pembangunan bersifat sosio-kultural.<sup>1</sup>

Dari pembangunan yang bersifat "economocentrism" ke pembangunan yang bersifat "homocentrism," di mana manusia yang menjadi titik pusatnya. Faktor-faktor sosial budayalah yang menentukan, sekaligus sebagai hasil akhirnya. Pembangunan selalu menuju kepada makin meningkatnya kesejahteraan manusia dan meningkatnya kualitas hidup, yang tidak cukup diukur hanya dengan ukuran-ukuran ekonomis. Pendapatan per kapita, prasarana-prasarana yang tersedia, fasilitas kesehatan, jumlah rumah sakit yang ter-

<sup>1</sup>Janusz Ziolkowski, "Cultural Dimensions of Development," *Cultures*, Vol. VI, No. 1, 1979, hal. 17-18.

sedia, atau perbandingan jumlah dokter dengan jumlah penduduk, dan lain-lain, semuanya merupakan indikator terhadap tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup. Namun ukuran itu saja belum memadai, karena kualitas adalah masalah penaksiran, persepsi dan akhirnya masalah penilaian. Pada dasarnya tuntutan akan kualitas hidup yang lebih baik merupakan tuntutan politik atau mungkin juga etis.<sup>1</sup>

Pembangunan nasional Indonesia yang sekarang sedang berjalan adalah juga pembangunan yang bertitik pusat manusia, dalam hal ini manusia Indonesia.

GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) Bab III, Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang, huruf B. Arah Pembangunan Jangka Panjang, secara jelas menyatakan bahwa "Pembangunan Nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia." Selanjutnya dikatakan bahwa: "Hal ini berarti bahwa pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah, seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan sebagainya, atau kepuasan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab, rasa keadilan dan sebagainya, melainkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara keduanya; bahwa pembangunan itu merata di seluruh tanah air; bahwa bukan hanya untuk sesuatu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat dan harus benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup, yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaan kita. Bangsa Indonesia menghendaki keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhan-nya, antara sesama manusia serta lingkungan alam sekitarnya, keserasian hubungan antara bangsa-bangsa dan juga keselarasan antara cita-cita hidup di dunia dan mengejar kebahagiaan di akhirat, karena kehidupan manusia dan masyarakat yang serba selaras adalah tujuan akhir pembangunan nasional; secara ringkas disebut masyarakat maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila."

Kutipan GBHN di atas secara jelas menunjukkan bahwa tujuan jangka panjang dari pembangunan nasional kita tidak lain adalah manusia Indonesia itu sendiri dan seluruh masyarakat Indonesia. Melalui usaha pembangunan nasional yang dilaksanakan secara bertahap kita ingin mewujudkan suatu masyarakat bangsa Indonesia yang bersatu, makmur dan berkeadilan sosial, di mana setiap warganya hidup dalam kesejahteraan lahir dan batin.

---

<sup>1</sup>Prof. Dr. Peter Atteslander, "Reflections on the 'Quality of Life' as a Function of Social Structures and Social Change - Sociological Perceptions," *Universitas*, Vol. 22, No. 1, 1980, hal. 63.

"Manusia yang utuh" adalah manusia yang sejahtera hidupnya baik secara lahiriah maupun batiniah dalam suatu perimbangan yang selaras di antara kedua aspek tersebut. Dari aspek batiniah manusia seutuhnya ialah seorang makhluk yang sadar nilai, yang mengkaji nilai dan yang mencari nilai.<sup>1</sup>

Dari sini kiranya jelas bahwa tujuan pembangunan nasional kita pada dasarnya adalah tujuan sosio-kultural. Pembangunan bidang ekonomi yang sejauh ini mendapatkan prioritas tinggi dalam pembangunan nasional bukanlah tujuan akhir dari pembangunan nasional itu sendiri. Sampai tahap tertentu bidang ekonomi harus mendapatkan prioritas tinggi karena tanpa peningkatan di bidang ekonomi tujuan jangka panjang tersebut tidak akan tercapai. Yang perlu ialah bahwa sementara memberikan prioritas tinggi kepada bidang ekonomi, bidang-bidang yang non-ekonomik tidak ditinggalkan tetapi terus dibangun dan diarahkan kepada suatu perkembangan yang positif. Langkah demikian adalah sangat penting karena pembangunan ekonomi mau tidak mau memberikan dampaknya juga di bidang-bidang yang non-ekonomik, yang apabila tidak mendapatkan penanganan secara baik sejak dari awal mungkin saja berkembang ke arah yang tidak diharapkan.

### PANCASILA, KONSEP BUDAYA NASIONAL

Dalam artinya yang (amat) luas, kebudayaan diartikan sebagai seluruh total dari pikiran, karya, dan hasil karya manusia yang tidak berakar kepada nalurinya dan yang karena itu hanya bisa dicetuskan oleh manusia sesudah suatu proses belajar.<sup>2</sup>

Dalam pada itu Deklarasi Meksiko tentang Kebijakan Kultural (The Mexico City Declaration on Cultural Policies) tahun 1982 menyatakan bahwa pada masa sekarang "Kebudayaan dapat dikatakan sebagai keseluruhan perangkat sifat yang berbeda jelas dari kejiwaan, materi, kecerdasan dan perasaan, yang menunjukkan ciri dari suatu masyarakat atau kelompok sosial. Di dalamnya termasuk tidak hanya kesenian dan kesusasteraan, tetapi juga gaya hidup, hak-hak dasar manusia, sistem nilai, tradisi dan kepercayaan."<sup>3</sup>

Betapapun ada beberapa hal dalam konsep kebudayaan dapat diidentifikasi ialah adanya aspek kejiwaan, pikiran dan perasaan manusia, karya

<sup>1</sup>Daed Joesoef, "Pendidikan Nasional Membentuk Manusia Seutuhnya," *Sinar Harapan*, 24 Januari 1984.

<sup>2</sup>Koentjaraningrat, *Bunga Rampai Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*, PT Gramedia, Jakarta, 1974, hal. 11.

<sup>3</sup>*Cultures* 33, Vol. IX, No. 1, 1983, hal. 15.

atau kegiatan manusia, serta hasil karya manusia. Bahwa kebudayaan selalu menunjukkan ciri dan watak suatu bangsa, masyarakat, atau kelompok sosial. Dan bahwa manusia hanya bisa mencetuskan kebudayaan dengan segala aspeknya tersebut sesudah sesuatu proses belajar, karena "potensi" tersebut tidak berakar pada nalurinya.

Mengingat aspek-aspek dalam kebudayaan tersebut di atas, Prof. Koentjaraningrat berpendapat bahwa kebudayaan itu mempunyai paling sedikit tiga wujud, ialah:

- a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya;
- b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat;
- c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.<sup>1</sup>

Dalam kerangka pembangunan nasional yang arahnya dalam jangka panjang ditujukan kepada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia berarti bahwa dengan usaha dan kegiatan pembangunan wujud-wujud kebudayaan nasional harus makin disadari, makin nyata dan benar-benar mewujudkan ciri dan watak manusia dan bangsa Indonesia.

Kita telah memiliki Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa yang merupakan kompleks ide dan nilai-nilai asasi yang "diangkat" dari sejarah bangsa selama berabad-abad. Nilai-nilai tersebut harus menjadi dasar, pedoman dan arah setiap kegiatan manusia Indonesia baik dalam hidup pribadinya, dalam hubungannya dengan hidup kenegaraan maupun dalam hidup kemasyarakatan pada umumnya serta mampu menghasilkan hasil-hasil karya yang memancarkan nilai-nilai tersebut. Dengan perkataan lain Pancasila adalah konsep kebudayaan kita yang perlu dan harus kita bina dan kita kembangkan selanjutnya.

Usaha membina dan mengembangkan konsep kebudayaan tersebut sehingga makin dalam tertanam, betul-betul disadari dan dimengerti (dihayati) oleh setiap orang untuk selanjutnya diwujudkan dalam kenyataan (diamalkan) adalah suatu proses pembangunan dan proses belajar yang berlangsung secara terus-menerus. Dari segi ini pembangunan nasional merupakan jalan untuk membina, mengembangkan dan mengamalkan budaya Pancasila dalam rangka mencapai tujuan jangka panjangnya ialah membangun manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia.

<sup>1</sup>Koentjaraningrat, *op. cit.*, hal. 15.

Bisa dimengerti apabila MPR pada tahun 1983, melalui penetapan GBHN menegaskan bahwa kita memandang pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Dalam hubungan ini Presiden Soeharto dalam pidato penutupan tahun 1983 antara lain menyatakan bahwa hal ini berarti titik berat perjuangan kita telah makin maju, yakni: dari pengamanan Pancasila ke pengamalan Pancasila. Meskipun, menurut presiden, tentu saja dalam tahap pengamalan Pancasila itu kita tidak akan mengendurkan kewaspadaan sedikit pun terhadap bahaya laten dari kekuatan-kekuatan ekstrem yang sejak semula memang tidak sejalan dengan Pancasila.

Dan seperti telah disinggung di muka, karena tujuan pembangunan nasional adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia, dengan usaha pembangunan ini harus bisa dicapai keadaan di mana budaya Pancasila itu benar-benar memasyarakat, atau dengan perkataan lain mencapai suatu masyarakat Pancasila. Membangun masyarakat Pancasila adalah membangun dan mengembangkan kebudayaan, kebudayaan Pancasila. Dan tujuan akhir dari seluruh pengembangan kebudayaan adalah mewujudkan suatu masyarakat manusiawi (*humane society*). Deklarasi yang dicetuskan oleh Konferensi Menteri-menteri Kebudayaan Asia di Yogyakarta tanggal 19 Desember 1973 antara lain menyatakan bahwa "Mewujudkan suatu masyarakat manusiawi adalah sasaran terakhir seluruh pengembangan kebudayaan."<sup>1</sup> Jadi membangun masyarakat Pancasila pada hakikatnya ialah membangun masyarakat yang memungkinkan semua dan setiap warganya hidup layak sebagai manusia, membangun dan mengembangkan dirinya mencapai suatu kehidupan yang sepuh dan selengkap mungkin sesuai dengan harkat kemanusiaannya.

Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila secara konkrit berarti membangun, mengembangkan dan melaksanakan kehidupan politik Pancasila, tata ekonomi Pancasila, kehidupan sosial dan budaya Pancasila, sistem hukum Pancasila, sistem pendidikan Pancasila, pendeknya pembangunan yang mencakup semua aspek kehidupan yang bernafaskan dan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Semua bidang harus dibangun dan dikembangkan di atas landasan Pancasila, dasar falsafah negara, pandangan hidup dan moral bangsa. Ini adalah konsekuensi yang tidak bisa dan tidak boleh dielakkan karena penerimaan kita terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai Pancasila harus terpancar di setiap aspek kehidupan negara dan masyarakat sebagai konkretisasi dari pengamalan Pancasila.

Hal ini jelas merupakan usaha atau pekerjaan raksasa dan makan waktu, karena yang dibangun pada dasarnya adalah manusianya, dalam hal ini ma-

<sup>1</sup>Kirdi Dipoyudo, *Pancasila Arti dan Pelaksanaannya*, CSIS, Juli 1979, hal. 75.

nusia Indonesia. Keadaan akan menjadi semakin berat manakala di kalangan para pejabat negara, para pemuka masyarakat dan para pemimpin pada umumnya pada dirinya belum mencerminkan "manusia Pancasila" sebagaimana mestinya.

Masyarakat kita yang menurut para ahli masih memiliki kadar paternalistik cukup tinggi, menempatkan para pemimpin baik formal maupun non-formal pada kedudukan sebagai "panutan" masyarakat. Masyarakat pada umumnya akan selalu memperhatikan dan mencontoh apa yang dikatakan dan diperbuat oleh para pemimpinnya.

Idealnya tentulah bahwa nilai-nilai Pancasila makin lama makin dimengerti oleh setiap manusia Indonesia, dihayati dan diamalkan. Setiap orang mengerti secara rasional dan menerima secara emosional, untuk selanjutnya melaksanakannya dalam praktek hidup sehari-hari. Dalam bahasa pendidikan maka aspek kognitif, afektif dan psikomotorik harus ditumbuhkan dan merangkul apa yang kita sebut sebagai penghayatan dan pengamalan Pancasila. Terhadap praktek yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, baik itu suatu keadaan, tindakan maupun kebijaksanaan, reaksi orang akan digerakkan tidak saja oleh bekerjanya pikiran sehat tetapi juga oleh perasaannya yang juga terlibat di dalamnya. Bahwa sesuatu keadaan itu berdasarkan akal sehat tidak benar, sekaligus juga menyentuh perasaan. Hal ini berlaku terhadap setiap segi kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan kita, ketidakadilan, perbuatan korupsi, diskriminasi, kemelataran, dan lain sebagainya.

Dari segi ini kita melihat betapa besar artinya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1978 yang dikenal sebagai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P-4 dalam rangka lebih memasyarakatkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai bagian dari usaha mewujudkan masyarakat Pancasila. Pancasila sebagai konsep budaya bangsa yang di dalamnya mengandung nilai-nilai dasar yang luhur memang hanya dapat dicetuskan melalui suatu proses belajar, dalam proses mana orang menjadi lebih mengenal, lebih mengerti dan lebih mendalami, atau dengan perkataan lain, lebih menghayati. Dan seseorang yang benar-benar menghayati sesuatu nilai tentu juga akan menerapkannya dalam praktek hidupnya sehari-hari atau mengamalkannya.

Namun perlu juga disadari bahwa dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan pada umumnya, pengamalan nilai-nilai Pancasila akan sangat ditentukan pula oleh penjabaran nilai-nilai tersebut dalam setiap peraturan perundangan dan peraturan-peraturan lainnya yang mengaturnya. Setiap peraturan hukum pada tingkat mana pun harus bersumber pada dan merupakan pancaran dari nilai-nilai Pancasila.

Itulah kiranya alasan terpokok perlunya pembangunan bidang hukum di Indonesia yang merupakan negara hukum ini, suatu usaha yang terus-menerus ke arah penyempurnaan sistem hukum nasional, yang secara singkat dapat disebut sebagai sistem hukum Pancasila.

Pemikiran di muka juga menunjukkan pentingnya arti pendidikan pada umumnya dalam rangka penanaman, pembinaan dan pengembangan nilai-nilai menuju kepada pengamalan nilai-nilai tersebut. Seperti di muka telah dikemukakan, Pancasila sebagai konsep budaya bangsa merupakan kompleks dari ide dan nilai-nilai dasar, yang hanya bisa dicetuskan sesudah suatu proses belajar, dalam proses mana orang menjadi semakin sadar nilai, semakin mendalam, semakin menghayati, sehingga pribadinya benar-benar "terkena" oleh nilai-nilai tersebut dan setiap saat terpancar dalam sikap dan perbuatan.

Hal ini tentu tidak berarti bahwa itulah satu-satunya arti dan fungsi pendidikan. Karena pendidikan, khususnya pendidikan formal, harus mampu mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga aspek pendidikan akademis ataupun pendidikan intelektual adalah juga sangat penting. Membangun manusia seutuhnya tentulah juga merangkum pengertian manusia yang cerdas secara intelektual, yang memiliki kemampuan untuk menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi demi memajukan kesejahteraan bangsa dan kemanusiaan pada umumnya.

Oleh karena itu pembangunan bidang pendidikan menempati kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional di samping bidang ekonomi dan bidang-bidang lainnya. Sistem pendidikan nasional kita yang tidak lain adalah sistem pendidikan Pancasila mengemban tugas berat dan mulia untuk membangun manusia-manusia Indonesia yang sadar dan menerima dengan seluruh pribadinya akan nilai-nilai dasar yang luhur dari Pancasila, yang cerdas dan menguasai materi berkat penguasaannya terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekurang-kurangnya itulah harapan terhadap sistem pendidikan nasional kita, meskipun dalam mengakhiri Pelita III dalam masyarakat masih terdapat perasaan waswas terhadap beberapa kebijakan dalam rangka pengembangan sistem pendidikan nasional.

Di luar sistem pendidikan formal, pendidikan non-formal maupun informal mempunyai peranan yang penting, pula khususnya dalam kaitannya dengan proses penyadaran, pendalaman dan pengembangan nilai-nilai. Ini antara lain dapat dilakukan melalui usaha memasyarakatkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila sebagaimana selama ini telah dilakukan dalam bentuk penataran-penataran P-4 yang makin lama makin meluas dari pusat sampai ke daerah-daerah. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa keberhasilan atau efektivitas usaha ini tentu akan banyak dipengaruhi oleh ber-

bagai faktor seperti metode penyampaian, faktor penatar dan peserta serta lain-lain faktor. Seperti halnya dengan proses belajar mengajar di lingkungan pendidikan formal, faktor guru, murid, prasarana dan sarana serta lingkungan merupakan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan proses tersebut.

Dari segi lain yang lebih khusus, karena dalam proses ini yang hendak ditanamkan adalah nilai yang diharapkan menjadi penuntun sikap dan tingkah laku, maka contoh dan keteladanan menduduki tempat yang penting dan merupakan salah satu faktor penentu.

Di luar penataran, proses sosialisasi nilai-nilai berjalan melalui jalur-jalur keluarga, pergaulan di masyarakat serta praktek-praktek kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan pada umumnya. Kiranya itulah salah satu dasar pemikiran MPR yang dalam Ketetapan No. II tahun 1978 tentang P-4 menyatakan bahwa P-4 merupakan penuntun dan pegangan hidup bagi sikap dan tingkah laku setiap manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara. Bahwa setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah, perlu mengusahakan secara nyata dan terus-menerus penghayatan dan pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Proses ini akan merupakan proses yang panjang dan makan waktu, tetapi sekurang-kurangnya telah dimulai. Yang kiranya perlu dilakukan adalah usaha yang terus-menerus untuk meningkatkan daya guna dan hasil gunanya dalam rangka menunjang tercapainya tujuan jangka panjang pembangunan nasional.

#### REPELITA IV: PERIODE PRA-KONDISI

Repelita IV yang dimulai tanggal 1 April 1984 merupakan periode yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Di dalam pentahapan pembangunan nasional yang dimulai dengan tahap Repelita I tahun 1969, diharapkan bahwa Repelita VI yang akan datang, atau periode lima tahun terakhir abad XX, akan merupakan tahap tinggal landas (take off) dari usaha pembangunan nasional. Ini berarti bahwa periode Repelita IV dan V merupakan periode pra-kondisi untuk tinggal landas, dalam periode mana segala usaha perlu dikerahkan dan diarahkan kepada makin kuatnya kerangka landasan yang diperlukan untuk tinggal landas. Dalam periode Repelita IV kita memperkuat kerangka landasan, sedangkan periode Repelita V mendatang merupakan periode pemantapannya.

Periode pra-kondisi merupakan suatu periode transisi, yaitu suatu masa peralihan dari masyarakat tradisional ke tahap tinggal landas. Pola-pola lama



belum sepenuhnya ditinggalkan tetapi sebaliknya pola-pola baru yang modern juga belum menemukan bentuknya yang mantap.

Di bidang ekonomi antara lain tampak bahwa proses industrialisasi telah berjalan dengan menerapkan cara-cara produksi modern, tetapi di lain pihak peranan sektor pertanian masih cukup besar dalam kehidupan ekonomi. Dalam Repelita IV titik berat pembangunan tetap diletakkan pada sektor pertanian, sedangkan sektor industri dikembangkan dan ditingkatkan ke arah industri yang menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun industri ringan. Pertumbuhan di sektor industri ini dan sektor-sektor lain di luar sektor pertanian dalam Pelita IV akan diusahakan maju lebih cepat dari sektor pertanian dalam rangka mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang, yang merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan bidang ekonomi. Usaha ke arah tujuan tersebut diproyeksikan dalam angka-angka pertumbuhan sebesar rata-rata 9,5% setahun untuk sektor industri dan 3% untuk sektor pertanian. Secara keseluruhan diperkirakan laju pertumbuhan ekonomi selama periode Repelita IV sebesar rata-rata 5%. Apabila seperti diperkirakan rata-rata pertumbuhan penduduk dalam Repelita IV dapat ditekan sampai sebesar kurang dari 2%, berarti bahwa dalam Repelita IV akan dicapai suatu peningkatan riil produk nasional per kapita sebesar 3%.

Yang tidak kalah pentingnya dalam rangka memperkuat kerangka landasan untuk tinggal landas ialah meneruskan dan meningkatkan pembangunan di bidang-bidang non-ekonomik, baik bidang sosial politik maupun sosial budaya. Hal ini secara tidak langsung sebenarnya telah disinggung oleh Presiden Soeharto dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1983, di mana antara lain dikemukakan bahwa dalam rangka memperkuat landasan untuk tinggal landas, dalam periode Repelita IV harus dapat diciptakan suatu "suasana serba Pancasila."

Penegasan ini kiranya dapat diartikan bahwa dalam periode Repelita IV dan Repelita V sebagai kelanjutannya, nilai-nilai dan norma-norma Pancasila harus makin terwujud dalam segala segi kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan kita. Suatu perkembangan yang telah mencapai tahapan tinggal landas umumnya diartikan bahwa dalam masyarakat telah tercipta kondisi-kondisi yang diperlukan yang memungkinkan proses perkembangan selanjutnya secara wajar (normal). Suatu perkembangan yang didukung oleh kekuatan-kekuatan dan mekanisme dalam masyarakat itu sendiri. Faktor-faktor pendukung dimaksud bukan semata-mata faktor ekonomi tetapi juga faktor-faktor non-ekonomik, politik, sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan.

Itulah sebabnya bahwa dalam periode Repelita IV dan V perlu diusahakan agar hasil-hasil pembangunan di bidang politik, sosial, budaya, pertahanan

dan keamanan serta bidang-bidang lain yang bersifat non-ekonomik yang telah dicapai selama periode tiga Pelita sebelumnya, dituntaskan dan dimantapkan, termasuk langkah-langkah koreksi dan penyempurnaan apabila diperlukan. Penetapan dalam GBHN 1983 yang menentukan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi kekuatan-kekuatan sosial politik di Indonesia merupakan salah satu contoh langkah yang dipandang perlu oleh MPR dalam rangka menuntaskan pembaharuan kehidupan politik yang prosesnya sudah dimulai sejak masa pra-Repelita. Dalam masa Repelita IV diharapkan bahwa proses ini akan berjalan terus dan semakin mantap, antara lain dengan makin meluasnya penerimaan asas tunggal Pancasila oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan di luar ketiga kekuatan sosial politik yang ada. Dengan demikian diharapkan bahwa kondisi politik dalam negeri akan semakin mantap sebagai salah satu syarat penting untuk tinggal landas. Meskipun perlu juga dikemukakan adanya interdependensi antara kehidupan politik dan bidang lainnya, baik ekonomi, maupun sosial dan budaya. Di samping itu stabilitas dalam kehidupan politik tidak hanya ditentukan oleh kekuatan-kekuatan sosial politik dan organisasi-organisasi kemasyarakatan tetapi oleh seluruh struktur dan mekanisme politik nasional termasuk lembaga-lembaga kenegaraan dengan segenap aparaturnya. Ini berarti bahwa pembangunan politik memang harus dilakukan secara meluas dan mendalam, menyangkut segi-segi idiiil seperti nilai dan ideologi, kelembagaan beserta aturan-aturan permainannya dalam rangka mewujudkan kehidupan politik Pancasila.

Salah satu ciri penting Repelita IV sebagai periode pra-kondisi untuk tinggal landas ialah diberikannya tempat utama bagi keadilan sosial dalam rangka meningkatkan taraf hidup, kecerdasan serta kesejahteraan seluruh rakyat secara lebih adil dan lebih merata. Atau dengan perkataan lain masalah pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka mewujudkan keadilan sosial akan mendapatkan penanganan yang lebih serius daripada periode-periode sebelumnya. Dalam hubungan ini dapat diketengahkan bahwa dalam Pelita III telah ditentukan delapan jalur pemerataan, sehingga dalam Repelita IV dapat diharapkan peningkatan intensitas dalam pelaksanaannya, baik dalam anggaran yang disediakan maupun dalam keterpaduan penanganannya sehingga lebih berhasil guna.

Di samping meningkatkan intensitas atau pendalaman pelaksanaan delapan jalur pemerataan, satu hal yang harus mendapatkan perhatian khusus dalam rangka mewujudkan keadilan sosial ialah penindakan secara sungguh-sungguh dan konsekuen terhadap praktek-praktek yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai keadilan sosial, terutama tindakan-tindakan korupsi yang menurut pengamatan masih terjadi di mana-mana. Hal ini berkaitan erat dengan niat Kepala Negara untuk menciptakan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan lebih meningkatkan efektivitas aparatur negara baik

sipil maupun militer, sebagaimana diucapkan dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1983.

Mengenai peningkatan intensitas pelaksanaan delapan jalur pemerataan dalam periode Pelita IV kiranya perlu diambil langkah-langkah yang menuju kepada peningkatan peranan swasta di berbagai bidang, tidak saja di bidang ekonomi tetapi juga di bidang-bidang non-ekonomik seperti pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan lain-lain. Dalam hal ini pemerataan kesempatan berusaha akan memegang peranan penting karena kaitannya dengan jalur-jalur pemerataan yang lain seperti pembagian pendapatan, kesempatan kerja, partisipasi dalam pembangunan serta pendidikan dan kesehatan. Peningkatan peranan swasta juga akan besar artinya dalam menggali sumber-sumber domestik yang dalam taraf tinggal landas yang akan datang harus menjadi faktor penunjang utama dalam proses pembangunan. Rangkaian langkah-langkah yang sudah dan akan diambil di bidang ekonomi dalam rangka memperkuat kerangka landasan seperti peningkatan ekspor komoditi non-minyak, kepariwisataan, pembaharuan sistem perpajakan, mendorong dan memobilisasi tabungan masyarakat serta pembaharuan kebijaksanaan perkreditan, semuanya itu jelas mensyaratkan peningkatan peranan swasta bagi keberhasilannya. Lebih-lebih apabila diingat bahwa dalam periode Repelita IV masalah ketenagakerjaan akan merupakan masalah yang cukup berat yang akan kita hadapi, peningkatan peranan swasta merupakan salah satu peluang penting bagi para pencari kerja baru sebagai realisasi dari usaha pemerataan kesempatan kerja.

Di bidang sosial budaya, tanpa mengesampingkan unsur-unsur yang lain, masalah pendidikan merupakan hal yang amat penting yang harus ditangani secara sungguh-sungguh dalam periode pra-kondisi. Bahkan tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa bidang pendidikan pada dasarnya menduduki posisi kunci dalam seluruh usaha pembangunan nasional. Pokok-pokok pikiran tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan dan Keadilan Sosial, yaitu pokok-pokok pikiran sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 pada dasarnya hanya akan terwujud apabila usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa berhasil. Tetapi kita memang tidak mungkin mengembangkan pendidikan dalam situasi pendidikan ekonomi yang kacau, kocar-kacir dan yang bertaraf tetap rendah. Jadi memang ada hubungan yang sangat erat antara tujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Mencerdaskan kehidupan bangsa hanya akan berhasil dalam suatu tingkat kesejahteraan yang memadai, sebaliknya peningkatan kesejahteraan umum tersebut hanya akan tercapai dan tetap dapat dipertahankan dalam tingkat kecerdasan umum yang tinggi pula.

Dalam hubungan ini strategi pembangunan nasional yang dilaksanakan sejak tahun 1969 melalui tahap-tahap Repelita kiranya dapat dipertanggungjawabkan, yaitu memberikan prioritas utama kepada pembangunan bidang ekonomi tanpa meninggalkan pembangunan di bidang-bidang non-ekonomik termasuk bidang pendidikan. Dalam Repelita IV sebagai periode pra-kondisi untuk tinggal landas kiranya sudah saatnya untuk memacu perkembangan bidang-bidang non-ekonomik tanpa mengurangi laju pertumbuhan ekonomi, sehingga kerangka landasan yang batu pertamanya telah diletakkan pada tanggal 1 April 1969 lima belas tahun yang lalu benar-benar semakin kuat, dan pada Repelita VI mendatang kita benar-benar sudah tinggal landas. Bahwa dalam masyarakat telah tercipta kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadinya proses perkembangan selanjutnya secara normal dan mandiri.

#### PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL BUDAYA

Seperti telah disinggung di muka, kondisi-kondisi dalam masyarakat yang dimaksud bukanlah kondisi ekonomi semata-mata tetapi termasuk juga kondisi-kondisi yang bersifat non-ekonomik baik politik, sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Di dalam GBHN 1983 Bab IV Pola Umum Pelita IV, di bawah sub-judul Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial Budaya, tercantum sepuluh butir sasaran masing-masing: Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Penelitian, Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana, Perumahan dan Pemukiman, Kesejahteraan Sosial, Generasi Muda, Peranan Wanita dalam Pembangunan.

Dalam periode pra-kondisi untuk tinggal landas di mana kita berusaha untuk memperkuat kerangka landasan, bidang-bidang yang merupakan sub-bidang Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial Budaya, mutlak harus dapat dikembangkan dan makin dimantapkan, sejajar dengan perkembangan yang telah kita capai sejauh ini di bidang ekonomi. Tetapi pada hakikatnya pembangunan bidang sosial budaya akan selalu berkenaan dengan aspek kejiwaan, sistem nilai, perasaan serta kecerdasan manusia. Dari segi ini tampak bahwa kuncinya terletak di bidang pendidikan. Melalui pendidikan kita kembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat sebagai bagian dari kerangka landasan yang kita bangun dan kita perkuat, sekaligus mempersiapkan iklim dan kondisi untuk periode berikutnya apabila kita benar-benar telah tinggal landas.

Akibat dari pembangunan memang tidak selamanya positif karena apa yang disebut sebagai efek samping akan selalu terjadi. Dalam kehidupan

agama misalnya sering kali timbul semacam kekhawatiran bahwa sebagai akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi sejajar dengan berjalannya proses pembangunan orang cenderung semakin materialistis dan semakin jauh dari ajaran agama. Apa yang sebenarnya terjadi mungkin tidak separah yang diduga, tetapi bahwa orang menjadi semakin kritis, semakin realistis dan semakin rasional kiranya benar, sehingga mempengaruhi sikap penghayatannya terhadap kepercayaan agama yang dipeluknya. Dengan perkataan lain perubahan yang diakibatkan oleh usaha pembangunan memang tidak hanya menyangkut dunia fisik tetapi pasti membawa pengaruh juga terhadap kejiwaan yang menyangkut penghayatan nilai dan sikap mental manusia.

Di dalam GBHN antara lain ditetapkan tentang perlunya makin diperkembangkan kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sehingga terbina hidup rukun di antara sesama umat beragama, di antara sesama penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan antara semua umat beragama dan semua penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam usaha memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa dan meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat. Namun demikian dalam praktek hidup kemasyarakatan masih juga sering terjadi ketegangan dan kerawanan yang dilatarbelakangi oleh perbedaan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Salah satu aspek kehidupan kemasyarakatan yang juga masih merupakan ganjalan dan kadang-kadang tercetus sebagai ketegangan sosial bahkan kerusuhan sosial ialah masalah pengintegrasian WNI keturunan asing, khususnya keturunan Cina, ke dalam masyarakat bangsa Indonesia. Dalam hal ini Pola Umum Pelita Keempat yang merupakan Bab IV GBHN secara jelas merumuskan: Usaha-usaha pembauran bangsa perlu lebih ditingkatkan di segala bidang kehidupan baik di bidang ekonomi maupun sosial dan budaya, dalam rangka usaha memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa serta memantapkan ketahanan nasional. Juga di sini kita berhadapan dengan kenyataan yang sering kali tampak jauh dari apa yang diharapkan. Padahal apabila kita menengok kembali ke masa lampau, pada masa masih bercokolnya kekuasaan kolonial di Tanah Air kita, para pejuang bangsa, para perintis kemerdekaan, telah menyadari bahwa memang terdapat faktor-faktor disintegratif dalam tubuh bangsa dan masyarakat kita yang apabila kita tidak waspada dan tidak melakukan usaha-usaha pencegahan akan memecah kita. Adanya suku-suku bangsa yang jumlahnya lebih dari dua ratus buah, masing-masing berbicara dalam bahasa-bahasa lokal, mempunyai adat-istiadat dan tata pergaulan masyarakat yang satu sama lain berbeda, yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan di antara satu sama lain. Kita juga menghadapi kenyataan adanya warga negara keturunan asing yang timbul dalam proses sejarah bangsa kita, baik yang berdarah Barat maupun Timur.

Masalah persatuan dan kesatuan bangsa yang mutlak harus digalang, dibina dan diperkembangkan, memang tidak hanya bersangkutan dengan masalah pengintegrasian WNI asli dan WNI keturunan asing, tetapi proses ini harus digerakkan sebagai usaha mewujudkan bangsa Indonesia yang satu, utuh, meskipun di dalamnya terdapat berbagai macam unsur yang eksistensinya tetap harus dihormati sepanjang tidak membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Sudah sewajarnya apabila kita bersyukur dan berterima kasih kepada para pejuang kita di masa lampau, para perintis dan para pemikir yang mempersiapkan kemerdekaan nasional, yang didorong oleh semangat patriotisme yang menyala-nyala, dedikasinya kepada cita-cita perjuangan, telah berhasil meletakkan satu landasan idiil bagi penggalangan persatuan dan kesatuan bangsa. Sila ketiga dari Pancasila yang dirumuskan dengan Persatuan Indonesia (dan bukan Kebangsaan Indonesia seperti diusulkan oleh Ir. Soekarno ataupun Perikebangsaan seperti diusulkan oleh Muh. Yamin), serta ditetapkannya Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara, jelas bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi merupakan hasil pemikiran, perenungan, pertukaran pikiran yang mendalam dan berdimensi jauh ke depan.

Kiranya adalah tugas generasi sekarang dan yang akan datang untuk secara terus-menerus mengembangkan nilai tersebut dan mewujudkan dalam kehidupan riil. Kita satu sama lain bisa berbeda dalam banyak hal, agama dan kepercayaan, suku, adat-istiadat, pandangan politik, profesi, tingkat sosial ekonomi, asal keturunan dan lain sebagainya, tetapi kita tetap satu juga adanya.

Analisa demikian masih bisa diteruskan dan diperpanjang menyangkut masalah-masalah sosial yang lain, tetapi satu hal cukup jelas bahwa kehidupan sosial kemasyarakatan kita, sosial politik dan sosial ekonomi, masih mengandung berbagai titik-titik rawan yang pada dasarnya mengungkapkan belum terealisasinya nilai-nilai luhur Pancasila secara penuh sebagaimana mestinya. Di dalam era pembangunan sekarang aspek-aspek sosial budaya ini yang secara langsung berkaitan dengan sistem nilai bisa menjadi lebih parah lagi manakala kita melupakan tujuan hakiki dari pembangunan itu sendiri yang tidak lain justru bersifat sosio-kultural seperti dikemukakan di muka.

Tepat sekali apa yang dinyatakan oleh Presiden dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1983 bahwa dalam periode memperkuat kerangka landasan dalam Repelita IV dan V harus bisa diciptakan "suasana serba Pancasila." Bagaimana suasana demikian dapat diciptakan atau diwujudkan harus menjadi perhatian dan pemikiran dari semua pihak, baik lembaga-lembaga kenegaraan, pemerintah maupun seluruh masyarakat. Dalam hubungan ini kita kembali kepada pengertian kebudayaan yang salah satu wu-

judnya adalah kompleks nilai-nilai yang hanya bisa dicetuskan sesudah suatu proses belajar karena tidak bersumber pada naluri. Dan dari sini bisa disimpulkan bahwa bidang pendidikan merupakan bidang yang sangat strategis karena merupakan kunci yang akan membuka jalan dalam proses implementasinya.

Inilah tantangan terbesar yang dihadapi dunia pendidikan kita dalam periode Repelita IV dan periode kelanjutannya nanti. Pendidikan harus mampu menjadi penunjang utama usaha memperkuat kerangka landasan, sekaligus menyiapkan iklim yang sehat untuk mempertahankan dan mengembangkan laju perkembangan selanjutnya apabila tahap tinggal landas sudah kita capai pada akhir abad ini. Di lain pihak kita menyadari bahwa bidang pendidikan kita masih banyak mengandung kelemahan-kelemahan baik dalam sarana, sistem maupun pengelolaan, yang betapapun merupakan kendala dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Keadaan kadang-kadang lebih dipersulit karena adanya kecenderungan terhadap tindakan-tindakan yang bersifat eksperimental di samping sikap ataupun pandangan yang etatis, yang melahirkan kebijakan-kebijakan yang mempersempit ruang gerak dan menyulitkan kalangan masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan. Ini pasti tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh GBHN yang merupakan pegejawantahan kehendak rakyat, yang dalam hal pendidikan swasta menegaskan: "Perguruan swasta perlu ditingkatkan mutu, peranan dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pendidikan nasional dan makin dikembangkan pertumbuhannya berdasarkan pola pendidikan nasional yang mantap, dengan tetap mengindahkan ciri-ciri khas perguruan yang bersangkutan."

Kita bersyukur bahwa dalam tahun pertama Repelita IV bidang pendidikan mendapatkan alokasi anggaran yang terbesar yang dapat dipandang sebagai manifestasi kemauan politik untuk membenahi dan mengembangkan bidang pendidikan sehingga mampu menjadi unsur penunjang yang sangat penting dalam memperkuat kerangka landasan. Meskipun perlu diberikan catatan bahwa besarnya anggaran tersebut tidaklah merupakan satu-satunya jaminan bagi keberhasilan usaha. Pemanfaatan secara tepat guna dari anggaran tersebut akan sangat berpengaruh terhadap hasil yang akan dicapai.

Hal lain yang memberikan prospek baik ialah terwujudnya kewajiban belajar dalam Pelita IV, dalam arti bahwa anak-anak dari kelompok umur 7-12 tahun akan mampu ditampung dalam pendidikan tingkat dasar, suatu langkah lebih maju ke arah mencerdaskan kehidupan bangsa. Harus diakui bahwa kemajuan di bidang pendidikan telah banyak kita capai selama tiga periode Repelita, meskipun di samping itu masih cukup banyak masalah yang belum terpecahkan. Dalam periode Repelita IV dan seterusnya dunia pendi-

dikan kita diharapkan bahkan dituntut untuk lebih berperan sehingga sungguh-sungguh menjadi penunjang utama usaha memperkuat kerangka landasan, sekaligus mempersiapkan generasi baru dalam menghadapi masa mendatang pada saat kita telah tinggal landas dan terus melaju ke arah terwujudnya cita-cita nasional.

Di dalam kata pengantarnya dalam majalah *Ilmu dan Budaya*, Prof. Sutan Takdir Alisyahbana antara lain menulis: "... bahwa soal pendidikan yang terpenting yang dihadapi bangsa kita adalah mengubah mentalitas, mengubah susunan nilai-nilai kebudayaan bangsa kita sehingga mendapat motivasi dan kemauan yang kuat untuk berusaha dan bekerja untuk mendapat ilmu, kemakmuran ekonomi dan teknologi..."<sup>1</sup>

Sebagaimana di muka telah disinggung, masa pra-kondisi adalah masa transisi, peralihan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Sikap mental tradisional yang selama ini lebih menguasai sikap dan pandangan masyarakat harus diubah ke mentalitas modern yang lebih rasional, obyektif dan realistis, meskipun tetap dilandaskan pada nilai-nilai asasi karena di situlah justru letaknya identitas kita yang jelas membedakan kita sebagai bangsa dari bangsa-bangsa lain.

Apabila kita di dalam periode Pelita IV dan V berhasil membenahi dunia pendidikan nasional kita sedemikian sehingga sistem pendidikan nasional mampu mempersiapkan generasi muda yang sungguh-sungguh sadar nilai dan selalu mencari dan mengkaji nilai berarti bahwa usaha memperkuat kerangka landasan untuk tinggal landas khususnya di bidang non-ekonomik sebagian besar dapat dilaksanakan. Kita menghadapi tahapan baru dalam pembangunan nasional yang menuntut mentalitas baru yang sesuai dengan perkembangan tersebut.

<sup>1</sup>*Ilmu dan Budaya*, Tahun VI, No. 4/Januari 1984, hal. 242.